

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam Bab 4, alternatif kebijakan PPh pasal 21 yang lebih menguntungkan adalah kebijakan PPh Pasal 21 di *gross up*, karena perusahaan dapat membebaskan tunjangan pajak yang diberikan sebagai unsur beban dan tunjangan tersebut dikenakan PPh Pasal 21 bagi karyawan.

Kebijakan-kebijakan tersebut berpengaruh pada besar kecilnya laba perusahaan yang dikenakan pajak, pajak penghasilan terutang, dan *take home pay*. Jika perusahaan menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 di *gross up*, maka tingkat laba sebelum pajak akan lebih rendah dibandingkan ketiga alternatif lainnya, namun ini akan berdampak pada pajak penghasilan perusahaan menjadi lebih kecil dan perusahaan akan menanggung selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial yang tidak berbeda dengan alternatif pertama dan ketiga yaitu kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung pegawai dan ditunjang perusahaan. Sedangkan alternatif kedua yaitu kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan, perusahaan akan menanggung selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial yang merupakan selisih terbesar. Ditinjau dari segi komersial, biaya fiskal yang besar dari kebijakan PPh Pasal 21 di *gross up* tersebut tampaknya seperti pemborosan, namun harus pula diperhatikan bahwa akibat biaya fiskal yang besar tersebut akan berdampak kepada laba sebelum pajaknya akan menjadi lebih kecil dan selanjutnya pajak penghasilan terutang perusahaan juga akan menjadi lebih kecil.

Sedangkan dari sudut pandang karyawan, dengan menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 di *gross up*, gaji yang dibawa pulang (*take home pay*) merupakan yang terbesar.

Jika dilihat dari jumlah PPh terutang dan selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial dari kebijakan PPh Pasal 21 di *gross up*, maka alternatif kebijakan ini menguntungkan perusahaan karena jumlah PPh terutang lebih kecil dan perusahaan menanggung selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial yang lebih kecil dari alternatif kedua yaitu kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan dan tidak berbeda dengan alternatif pertama dan ketiga yaitu kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung pegawai dan ditunjang perusahaan. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan yang paling menguntungkan bagi perusahaan dikaitkan dengan pajak penghasilan terutang perusahaan dan selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial adalah kebijakan PPh Pasal 21 di *gross up*.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisa atas keempat alternatif kebijakan PPh Pasal 21, yaitu kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung pegawai, kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan, kebijakan PPh Pasal 21 ditunjang perusahaan, dan kebijakan PPh Pasal 21 di *gross up*, peneliti menyarankan perusahaan untuk menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 di *gross up*.

Hal ini dikarenakan, kebijakan PPh Pasal 21 di *gross up* lebih menguntungkan dari pada menggunakan kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan, yang selama ini diterapkan perusahaan, yang dikaitkan dengan pajak penghasilan terutang serta selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial yang harus ditanggung perusahaan.